

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM  
OLEH PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN BELITANG  
KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

Apriyani  
07121001017

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya, Ogan Ilir  
September 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM  
OLEH PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN BELITANG  
KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara

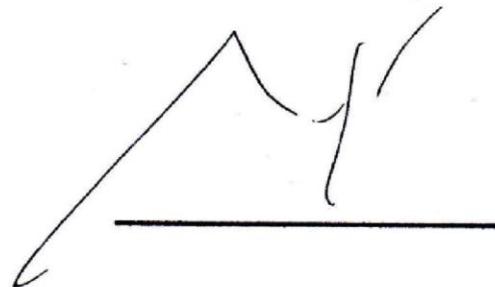
Oleh :

APRIYANI  
07121001017

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si  
NIP. 196311061990031001



---

Pembimbing II

Dra. Retno Susilowati, M. M  
NIP. 195905201985032003



---

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Oleh Perempuan (SPP) Di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 September 2018.

13 September 2018

Ketua

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si  
NIP. 19631106 199003 1001

Anggota

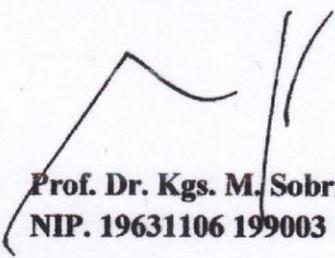
2. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 19590520 198503 2003

3. Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 19570605 198503 1003

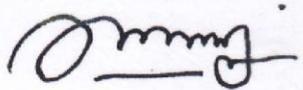
4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19770512 200312 1003

Mengetahui :

**Dekan FISIP**

  
Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si  
NIP. 19631106 199003 1001

**Ketua Jurusan Administrasi Negara**

  
Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA  
NIP. 19810827 200912 1002

### **Motto**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” – QS Ar-Ra’d 13:11**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

**Bapak Kusni dan Mamak Musingah**

**Mbak Ulik sekeluarga**

**Sahabat-sahabat terbaikku**

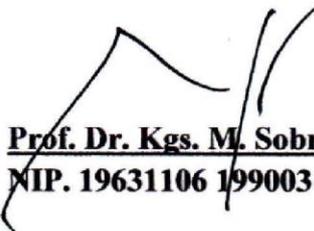
**Almamater kebanggaanku**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kemacetan pembayaran angsuran pinjaman yang terjadi dalam ruang lingkup pengelolaan dana Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan informan Ketua BKAD, Ketua BP-UPK, Ketua UPK, Bendahara UPK, Ketua Tim Verifikasi, Ketua Tim Pendanaan, Koordinator dan Penerima manfaat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh terkait akuntabilitas dana SPP. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dana SPP belum berjalan dengan optimal, walaupun dalam pelaksanaan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan telah dibuat dengan baik sesuai dengan yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang sudah ditentukan dalam menciptakan akuntabilitas belum dilaksanakan. Adapun saran yang diberikan agar akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan baik antara lain membentuk lembaga pengawas yang khusus untuk mengawasi kelompok SPP dan pihak UPK serta Tim Verifikasi harus lebih objektif dalam menyeleksi anggota SPP apalagi saat melakukan verifikasi lapangan.

Kata kunci : Akuntabilitas, Simpan Pinjam oleh Perempuan

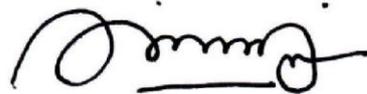
**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si**  
**NIP. 19631106 199003 1001**

**Pembimbing II**

  
**Dra. Retno Susilowati, MM**  
**NIP. 19590520 198503 2003**

**Indralaya, September 2018**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

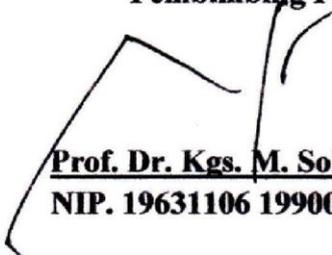
  
**Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## ABSTRACT

*This research is motivated by the amount of traffic payments on loan payments that occurs within the scope of the management of Savings and Loans by Women (SPP). This study aims to find out the implementation of Accountability Management of Savings and Loans by Women (SPP) in District Belitang District OKU East South Sumatra. This research uses descriptive qualitative research method with descriptive research type. The research focus of this research is accountability of honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, and policy accountability. Data obtained from the primary data is through interviews with informants Chairman BKAD, Chairman of BP-UPK, Chairman UPK, UPK Treasurer, Chairman of the Verification Team, Chairman of the Funding Team. Coordinator and Beneficiaries. Secondary data is data obtained related to SPP fund accountability. Based on the results of analysis and research in the field can be concluded that the accountability of SPP fund has not run optimally, although in the implementation of accountability honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, and policy accountability have been made well in accordance with the specified, but in the implementation of legal accountability, the accountability of the process and the accountability of the program that has been determined in creating accountability has not been implemented. The suggestions given so that accountability can be implemented properly, among others, establish a special supervisory agency to supervise the SPP group not to commit frauds and the UPK and Verification Team should be more objective in selecting SPP members especially when conducting field verification.*

*Keywords: Accountability, Savings and Loans by Women*

**Pembimbing I**



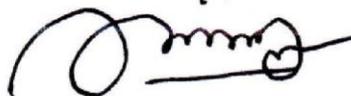
**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si**  
NIP. 19631106 199003 1001

**Pembimbing II**



**Dra. Retno Susilowati, MM**  
NIP. 19590520 198503 2003

**Indralaya,      September 2018**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Terimakasih atas karunia Yang Maha Segalanya Allah SWT karena berkat rahmat dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan*“. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Atas segala hal yang terlewat dan dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terbaik di dalam hidup saya, kedua orang tuaku tercinta, Kusni dan Musingah kalian adalah pemacu hidup saya untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Mbak Ulik, Mas Sutris, Adek Satria dan Adek Aqila tersayang, yang selalu memberikan warna dalam kehangatan dan keceriaan keluarga.

Penulis juga berterimakasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu dalam berbagai hal selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing Skripsi I yang memberikan banyak masukan dan saran, beserta jajarannya.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Ermanovida, S. Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, M. M, selaku dosen sekaligus Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mendengarkan, menginspirasi, memberikan saran dan berbagi banyak hal tentang ilmu pengetahuan serta pengalaman guna kehidupan serta kelancaran skripsi saya.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M. Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.
7. Ketua BKAD Kecamatan Belitang, Herman Susanto, SE., Ketua UPK Kecamatan Belitang, Ari Iswandi, SP., dan seluruh pegawai di ruang lingkup BKAD Kecamatan Belitang yang telah bersedia membantu untuk pemberian data pada skripsi ini. Penulis menyadari adanya

kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

8. Sahabat Ika Aprilia Setiati SH dan May Munah atas segala kebersamaan selama di UNSRI
9. Keluarga Kelapa Gading Kost, Anik Suliatri, S. Pd., Mika Purniati, S. Pd., Yulianti Rizki, S. Sos., Erlina, S. Sos., Ns. Miranti Dea Dora, S. Kep, Renti Yuliana, S. Sos., Mega Dewi Sinta, Ingtyas Nia Larasati dan Melda Darmayanti atas kenangan-kenangan tak terlupakan.
10. Rekan seperjuangan semasa KKN Ibnu Hardi, Putri, Erika, Mirza, Conny, Lia, dan Levy.
11. Angkatan almamaterku Ilmu Administrasi Negara khususnya 2012 yang begitu saya banggakan.
12. Saudara satu organisasiku Ikatan Mahasiswa Belitang (IMB) sebagai tempat saya memperoleh pengalaman pembelajaran dan ilmu mengenai arti kerjasama dalam kebersamaan, saya ucapkan banyak terimakasih.

Penulis mengharapkan kritik, serta saran guna perbaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, September 2018  
Penulis

Apriyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian .....	18

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	19
1. Keuangan Negara Dalam Ilmu Administrasi Negara .....	19
2. Akuntabilitas.....	21
3. Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD).....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Berfikir .....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Definisi Konsep.....	43
C. Fokus Penelitian .....	44
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	45

E. Informan Penelitian .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Belitang .....	50
1. Sejarah Singkat Kecamatan Belitang .....	50
2. Geografis .....	51
3. Pemerintahan .....	52
4. Penduduk dan Tenaga Kerja .....	53
5. Sosial .....	55
6. Pertanian .....	56
7. Industri.....	57
8. Perdagangan.....	58
9. Transportasi dan Komunikasi.....	59
10. Keuangan dan Harga .....	60
11. BKAD Kecamatan Belitang .....	61
B. Pembahasan .....	63
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum .....	65
2. Akuntabilitas Proses .....	70
3. Akuntabilitas Program .....	91
4. Akuntabilitas Horizontal.....	98
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	5
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
3. Desa di Kecamatan Belitang yang berpartisipasi dalam SPP .....	9
4. Nama kelompok SPP tahun 2015 .....	10
5. Kolekibilitas Pinjaman .....	13
6. Kolekibilitas Pinjaman Rekap .....	14
7. Identifikasi Kolekibilitas Kelompok.....	14
8. Penelitian Terdahulu .....	40
9. Fokus Penelitian .....	45
10. Luas wilayah masing-masing desa di Belitang.....	52
11. Jumlah Dusun, Rukun Tetangga, Perangkat Desa dan Anggota BPD masing-masing Desa di Kecamatan Belitang, 2015 .....	53
12. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin masing-masing desa di Kecamatan Belitang .....	54
13. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin masing-masing Desa di Kecamatan Belitang, 2015.....	55
14. Luas Lahan Sawah masing-masing Desa di Kecamatan Belitang.....	57
15. Jumlah Perusahaan Industri dan Rumah Tangga di masing-masing Desa di Kecamatan Belitang, 2015.....	58
16. Panjang jalan dirinci menurut Jenisnya di masing-masing Desa di Kecamatan Belitang, 2015.....	60
17. Jumlah Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan di masing-masing Desa di Kecamatan Belitang, 2015.....	67
18. Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Kecamatan Belitang .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Dimensi Akuntabilitas .....	25
2. Kelembagaan BKAD .....	33
3. Alur Perguliran .....	35
4. Kerangka Penelitian.....	42
5. Profil BKAD Kecamatan Belitang .....	63
6. Verifikasi lapangan.....	67
7. Transaksi bank.....	73
8. Ketua UPK memberikan pengarahan penerima manfaat .....	81
9. Tim Verifikasi saat verifikasi lapangan.....	81
10. Ketua UPK dan Ketua BKAD menandatangani SPK .....	82
11. Ketua UPK memberikan pengarahan saat pencairan .....	83
12. Bendahara UPK memberikan dana ke penerima manfaat .....	83
13. Rencana Arus Kas Biaya Operasional UPK.....	85
14. Sumarmi dengan usahanya.....	96
15. Sujarwati dengan usahanya.....	96
16. Nurul dengan usahanya .....	97
17. Laporan bulanan dan laporan tahunan.....	99
18. Musyawarah Antar Desa.....	101

## DAFTAR SINGKATAN

	Halaman
1. APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	4
2. BKAD : Badan Kerjasama Antar Desa .....	4
3. BLM: Bantuan Langsung Masyarakat .....	3
4. BPD : Badan Permusyawaratan Desa.....	4
5. BP-UPK : Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan .....	29
6. MAD : Musyawarah Antar Desa .....	82
7. MPD : Majelis Permusyawaratan Desa .....	4
8. OKU : Ogan Komerling Ulu .....	4
9. PNPM Mpd: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.	12
10. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	31
11. SPK : Surat Perjanjian Kredit.....	82
12. SPP : Simpan Pinjam oleh kelompok Perempuan .....	4
13. UPK : Unit Pengelola Kegiatan.....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	121
2. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing I.....	122
3. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing II .....	124
4. Lampiran Surat Izin penelitian.....	128
5. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri.....	129
6. Standar Operasional dan Prosedur UPK Belitang.....	208
7. Surat Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.....	213
8. Nota Dinas BA verifikasi pelaksanaan pengakhiran PNPM MPd th 2014.....	215
9. Laporan Perkembangan Pinjaman UPK Belitang .....	217
10. Laporan Koleabilitas Pinjaman .....	227
11. Pedoman Wawancara .....	228

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematis. Berdasarkan data yang diolah oleh IMF (*International Monetary Fund*), Indonesia berada pada ranking ke-92 negara termiskin di dunia dari total 193 negara yang ada berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai Juli 2011. Ranking ditentukan dengan menghitung pendapatan rata-rata perkapita setiap negara, Indonesia memiliki pendapatan perkapita sekitar \$7.782 (RP 101 juta). Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2013). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997: 137). Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kemiskinan yang terjadi. Ada Program Klaster yang dilakukan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Program Klaster terbagi dalam 4 Klaster. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah. Dalam program Klaster 1 ada yang berhubungan dengan program Klaster 4 yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di

puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah, biasanya disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Klaster 2 berisi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara ekonomi baik yang berada di kota maupun di desa. Klaster ini diibaratkan sebagai kail karena bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Dalam klaster 2, pemerintah melaksanakan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan-perdesaan. Program ini dilaksanakan oleh 13 kementerian dan 1 lembaga. Klaster 3 berisi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT. Asuransi Kredit Indonesia. KUR memberikan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program Klaster 4 merupakan pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan kemiskinan yang merupakan program prioritas pemerintah.

Dengan program klaster diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan agar kemiskinan semakin berkurang. Disamping program yang hanya memberikan bantuan secara cuma-cuma, juga dirumuskan program dengan jalan pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik :
  - a. pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
- 2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

- 3) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah;
  - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu dari berbagai cara yang ditempuh untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah meluncurkan PNPM MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) mulai tahun 2007. Melalui PNPM dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Masyarakat dapat ditumbuhkembangkan dengan proses pembangunan yang partisipatif sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek penanggulangan kemiskinan. PNPM merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia yang menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana yang dikeluarkan BLM untuk setiap kecamatan mulai dari Rp 750 juta sampai Rp 3 Miliar tergantung jumlah penduduk miskin yang ada di masing-masing kecamatan.

Setelah berjalan selama 7 tahun, program PNPM MPd ini dihentikan sebagai konsekuensi logis dari pengaturan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, maka berbagai pengaturan tentang pembangunan desa yang sudah ada harus disesuaikan dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Undang Undang Desa. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 2015 – 2019, pengaturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan

pengaturan UU Desa. Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM maupun program-program sejenis yang sudah berakhir harus ditata.

Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM ke dalam UU Desa yang sudah ditetapkan adalah mengkonsolidasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini tercantum dalam Surat No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan Dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MPd (PNPM Mpd). PNPM dan APBDes ini mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaat yang sama yaitu dana yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk tiap-tiap desa. Perbedaan dari keduanya terletak pada lembaga pengelolanya. Berbeda halnya dengan PNPM yang dananya dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan, dana APBDes ini benar-benar diberikan dan dikelola oleh lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atupun lembaga desa lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Singkatnya pada tahun 2015, PNPM dihapuskan, dengan catatan BKAD yang dibantu dengan lembaga pendukung teknis tetap menjalankan program dari dana bergulir seperti Simpan Pinjam oleh kelompok Perempuan (SPP). Program yang dihapuskan antara lain adalah kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi.

Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan sudah menyentuh 4.805 kecamatan di 32 Provinsi. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menjadi salah satu kabupaten diantara ratusan kabupaten di Indonesia yang mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat

melalui PNPM. Ini mengartikan bahwa di OKU Timur masih banyak masyarakatnya yang tergolong miskin. Sesuai dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang menjelaskan tentang pemilihan aspek wilayah yang diberikan dana PNPM Mandiri yang menyatakan bahwa *Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut; a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal.* Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di OKU Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

NO	Kecamatan	Prasejahtera	Sejahtera			
			I	II	III	III+
1	Martapura	882	1.800	6.072	3.253	956
2	Bunga Mayang	343	750	2.408	805	72
3	Jayapura	301	560	2.197	875	54
4	Buay Pemuka Peliung	656	1.552	3.953	3.106	411
5	Buay Madang	784	2.959	5.578	2.019	52
6	Buay Madang Timur	1.033	3.226	8.057	3.644	234
7	Buay Pemuka Bangsa Raja	303	1.357	1.704	493	-
8	Madang Suku I	992	1.906	3.989	2.350	633
9	Madang Suku II	351	1.558	2.375	4.582	141
10	Madang Suku III	569	1.093	3.842	2.247	25
11	Belitang Madang Raya	579	1.751	4.139	4.788	5
12	Belitang	1.123	1.565	2.488	8.904	25
13	Belitang Jaya	409	1.079	1.834	2.470	-
14	Belitang III	596	1.235	4.593	2.978	166
15	Belitang II	691	1.657	5.167	4.039	21
16	Belitang Mulya	400	848	1.800	2.586	1
17	Semendawai Suku III	740	964	4.813	4.176	17
18	Semendawai Timur	549	3.040	5.155	1.155	49
19	Semendawai Barat	576	4.402	2.496	441	-
20	Cempaka	685	1.748	2.459	696	-
Jumlah		12.562	35.050	75.119	55.607	2.862

**Sumber : BKBKS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2014**

Total penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2015 sebanyak 649.394 jiwa. Kecamatan Buay Madang Timur memiliki persentase jumlah penduduk terbanyak yaitu 8.76 persen, diikuti Kecamatan Belitang dengan penduduk sebanyak 53.328 jiwa, disusul Kecamatan Martapura dengan penduduk sebanyak 52.252 jiwa. Adapun kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yang memiliki penduduk sebanyak 3.857 jiwa. Untuk data tentang kemiskinan, Kecamatan Belitang memiliki keluarga prasejahtera terbesar yaitu 1.123 keluarga. Sedangkan keluarga yang paling sejahtera, ditunjukkan dengan golongan III+ paling banyak terdapat di kecamatan Madang Suku III yaitu sebesar 2.247

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat kondisi masyarakat dengan melihat tingkat kesejahteraannya di masing-masing kecamatan. Kategori Pra Sejahtera sering dikelompokkan sebagai kategori sangat miskin, Sejahtera I dikelompokkan sebagai kategori miskin, Sejahtera II dikelompokkan sebagai kategori menengah kebawah, Sejahtera III dikelompokkan sebagai kategori menengah keatas, dan Sejahtera III+ dikelompokkan sebagai kategori kaya.

Dari 20 kecamatan yang ada di OKU Timur, Kecamatan Belitang menjadi salah satu kecamatan yang paling banyak memiliki keluarga prasejahtera. Jumlah penduduk di Belitang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No.	Desa	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Sido Rahayu	1.382	1.384	2.766
2.	Sukarame	951	944	1.895
3.	Tawang Rejo	882	844	1.726
4.	Triyoso	847	783	1.630
5.	Serbaguna	260	238	498
6.	Sumber Suko	945	860	1.805
7.	Sukajadi	251	266	517
8.	Sukosari	652	577	1.229
9.	Pujorahayu	1.166	1.078	2.244
10.	Sidomulyo	2.694	2.521	5.215

11.	Tanjung Raya	669	661	1.330
12.	Harjo Winangun	1.284	1.214	2.498
13.	Tegal Rejo	1.588	1.724	3.312
14.	Gumawang	3.326	3.355	6.681
15.	Bedilan	1.711	1.693	3.404
16.	Sidogede	1.360	1.298	2.658
17.	Sido Makmur	1.068	1.043	2.111
18.	Gunung Mas	726	703	1.429
19.	Karang Kemiri	1.031	991	2.022
20.	Sidodadi	1.075	1.032	2.107
21.	Sumber Suko Jaya	1.057	1.017	2.074
22.	Gedung Rejo	1.176	1.146	2.322
23.	Mojosari	480	541	1.021
24.	Ketapang	440	394	834
Jumlah		27.021	26.307	53.328

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ulu Timur**

Penduduk laki-laki di Belitang berjumlah 27.021 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 26.307 jiwa. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk perempuan Belitang yang berjumlah 26.307 jiwa dari 1.123 keluarga RTM dapat mengajukan pinjaman SPP dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur UPK bagian B Standar Pengelolaan Perguliran poin II Persyaratan Kelompok Pinjaman Perguliran.

Belitang merupakan kecamatan dengan sebagian besar kawasan pertanian dan sebagian besar penduduk Belitang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga pemerintah memberlakukan pemberdayaan perempuan melalui SPP. Tak heran, jika penggunaan dana SPP masih sangat dibutuhkan, sebab mengandalkan hasil sebagai petani saja tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang ditanggung oleh seorang kepala keluarga. Sebagian dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I memanfaatkan program pemerintah yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, yaitu Program SPP. Perempuan-perempuan yang termasuk dalam kelas Rumah Tangga Miskin (RTM) mengajukan pinjaman dana ke UPK dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar dapat membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri yang bisa meringankan beban suaminya.

Secara terperinci, saat ini pemerintah menjalankan suatu program pemberdayaan dari dana bergulir yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan keadilan gender dengan mengajak kaum perempuan aktif berperan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemihakan tersebut berupa program yang disebut dengan kegiatan Simpan Pinjam oleh kelompok Perempuan (SPP). Syarat untuk kelompok yang mengikuti program SPP adalah sebagai berikut :

- a. Anggota terdiri dari perempuan minimal berumur 17 tahun dan maksimal 55 tahun yang mempunyai ikatan pemersatu kuat, misalnya Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya yang tergabung dalam suatu kelompok;
- b. Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- c. Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan;
- d. Jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang;
- e. Tiap-tiap kelompok SPP mengajukan proposal dengan jumlah dana pinjaman maksimal hanya Rp 5.000.000 perorang tanpa agunan, dan diperbolehkan lebih dari Rp 5.000.000 perorang dengan syarat memberikan agunan sebagai jaminan yang berupa sertifikat tanah, sawah, rumah ataupun bentuk kekayaan lainnya.

Sistem pengembalian diberikan dengan tiga bentuk. Pertama, sistem pengembalian dana diangsur setiap bulan selama 10 bulan, dengan rincian dana yang harus dikembalikan setiap bulan adalah 10% dana pinjaman, dan 2% lainnya untuk biaya administrasi dan simpanan wajib anggota. Kedua, sistem pengembalian triwulan yang diangsur setiap 3 bulan sekali. Rinciannya adalah bulan pertama dan bulan kedua hanya membayar bunga sebesar 2%, sedangkan pada bulan ketiga membayar angsuran pokok sebesar 30% dan membayar bunga sebesar 2%. Ketiga, sistem pengembalian musiman yang diangsur setiap 6 bulan sekali. Rinciannya adalah bulan pertama sampai bulan kelima hanya membayar bunga 2%

setiap bulannya, kemudian pada bulan ke-enam membayar angsuran pokok sebesar 50% dan bunga sebesar 2%.

Adapun desa yang tergabung dalam partisipasi program SPP sampai Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Desa di Kecamatan Belitang yang Berpartisipasi dalam SPP**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>ALOKASI PINJAMAN</b>	<b>Jumlah Kelompok</b>
1	Sidogede	1.353.500.000	46
2	Harjo Winangun	2.092.500.000	61
3	Gumawang	877.500.000	47
4	Triyoso	705.000.000	32
5	Tawang Rejo	993.500.000	37
6	Banjarejo	29.500.000	2
7	Margokoyo	60.000.000	3
8	Sidomulyo	20.000.000	1
9	Tegal Rejo	946.000.000	33
10	Sidomakmur	541.000.000	17
11	Sumbersuko Jaya	1.242.000.000	46
12	Sumber Suko	1.771.000.000	53
13	Sidorahayu	897.000.000	33
14	Rejosari	35.000.000	2
15	Bedilan	1.363.000.000	37
16	Sumber Agung	20.000.000	1
17	Gedung Rejo	402.000.000	23
18	Pujorahayu	658.000.000	29
19	Sidodadi	1.424.000.000	35
20	Tanjung Raya	808.000.000	31
21	Sukajadi	90.000.000	4
22	Karang Kemiri	119.000.000	9
23	Sukosari	423.000.000	22
24	Gunung Mas	186.000.000	12
25	Sukarami	72.000.000	4
26	Mojosari	316.000.000	12
<b>TOTAL</b>		<b>17.444.500.000</b>	<b>632</b>

**Sumber : Laporan UPK Belitang**

Berdasarkan data diatas, ada 26 desa yang ikut berpartisipasi dengan nilai nominal pinjaman yang berbeda-beda. Dilihat dari laporan bulanan UPK Desember 2015 terhitung ada 171 kelompok atau 726 penerima manfaat per Desember 2015 yang sudah pernah tergabung dalam program SPP. Artinya sudah ada 726 RTM yang memanfaatkan dana SPP

untuk kepentingan usaha. Sejauh ini, belum pernah ada penolakan proposal dari 632 proposal yang pernah mengajukan usulan. Sebelum mengajukan proposal pinjaman, kelompok-kelompok tersebut sudah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari sekretaris desa di masing-masing kelompok. Jika kelompok tersebut memiliki anggota yang tidak termasuk dalam keluarga RTM, maka sekretaris desa memiliki hak untuk tidak menyetujui proposal tersebut. Ada dua pilihan yang dapat diambil oleh kelompok, pertama kelompok tersebut tidak mengajukan proposal sama sekali dan kedua, kelompok tetap diperbolehkan mengajukan proposal dengan catatan anggota yang tidak masuk dalam RTM harus dicoret atau dalam artian tidak diikuti sertakan.

Data dana akumulasi dari awal pelaksanaan program SPP yaitu sejak tahun pertama sampai Desember 2015 dan sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 17.444.500.000 (Terbilang *tujuh belas milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*). Terlihat bahwa desa Harjo Winangun menggunakan dana yang paling besar, yaitu Rp 2.092.500.000 (Terbilang *dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan yang menggunakan dana yang paling kecil adalah desa Sumber Agung yaitu Rp 20.000.000 (terbilang *dua puluh juta rupiah*). Perbedaan jumlah pinjaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena jarak. Jarak yang harus ditempuh oleh kelompok cukup jauh untuk sampai di kecamatan dan mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi saat di perjalanan. Berikut nama-nama kelompok yang mengajukan pinjaman pada tahun 2015, yaitu:

**Tabel 4. Nama Kelompok SPP Tahun 2015**

No	Tanggal Peminjaman	Nama Kelompok
1.	20 April 2015	Karang Kemiri ( Purnama ) Pujorahayu ( Melati dan Kejora)
2.	21 April 2015	Sumber Suko Jaya(Nusa Indah Jaya) Mojosari ( Teratai ) Pujorahayu ( Mawar )

3.	12 Mei 2015	Harjowinangun ( Tirta Kencana I, Tirta Kencana II, Banjar I, Banjar II, dan Bima Sakti )
4.	21 Mei 2015	Tegal Rejo (Dasa Wisma Melati I, Dasa Wisma II) Triyoso ( Tunas Harapan, Harapan Jaya) Mojosari ( Makmur )
5.	19 Juni 2015	Harjowinangun ( Banjar Negara ) Sumpersuko ( Dahlia, Dahlia II) Gedung Rejo ( Sumber Jaya I, Sumber Jaya II) Karang Kemiri ( Purnama II )
6.	8 Juli 2015	Pujorahayu (Rahayu) Tawang Rejo ( Seroja ) Sumpersuko (Lidah Buaya II, Sakura) Gedung Rejo ( Mandiri, Kantil )
7.	25 Agustus 2015	Triyoso ( Ar-Rahman) Sukosari ( Anggrek, Tulip ) Gunung Mas ( Kitela )
8.	22 September 2015	Sidogede ( Kencana ) Sumpersuko Jaya ( Nusa Indah II, Nusa Indah III, Mahkota, Raflesia) Sidodadi ( Merah Delima ) Sukosari ( Cemara ) Gunung Mas ( Bangau ) Mojosari ( Bintang Kejora )
9.	16 Oktober 2015	Harjowinangun ( Anggrek ) Triyoso (Tunas Jaya) Sumpersuko(Merpati, Mawar II) Sidodadi ( Al-ikhlas, Al-Ikhlal II, Al-Ikhlal III, Darussalam) Mojosari ( Kamboja )
10.	23 November 2015	Tawang Rejo ( Tunas Baru ) Sukosari (Aster ) Sidorahayu ( Kenanga ) Mojosari ( Kamboja, Mawar)
11.	16 Desember 2015	Tawang Rejo ( Dahlia ) Tanjung Raya ( Melati, Mawar, Kamboja, Minarti) Karang Kemiri ( Praja Mukti Indah II)

**Sumber : Laporan UPK Belitang**

Pada tahun 2015, ada 61 kelompok SPP yang mengajukan pinjaman dengan jumlah anggota dan jumlah nominal yang berbeda-beda setiap kelompok tergantung dengan kebutuhan masing-masing anggota. Dana ini digunakan untuk kepentingan berbagai macam usaha, misalnya ada yang menggunakan untuk usaha kerupuk singkong, usaha keripik pisang, modal jual ikan keliling, penambahan modal tata rias pengantin/salon, pembuatan rempeyek kacang, jamu, gorengan, catering, tahu, tempe, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa penerima manfaat yang tidak ingin disebutkan nama dan kelompoknya mengakui menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang seperti membeli lemari, kursi tamu, ataupun barang-barang elektronik yang lain sebelum untuk kepentingan usaha. Ini bertentangan dengan yang tercantum dalam bagian B di Standar Operasional dan Prosedur UPK dalam aturan umum Standar Pengelolaan Perguliran poin 1 yang menyatakan bahwa pinjaman perguliran berstatus sebagai usaha pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan jasa keuangan untuk kegiatan SPP. Sejalan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri penjelasan X Pengelolaan dana bergulir yang menyatakan *“Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM MPd yang mempunyai tujuan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan usaha”*. Kenyataannya masih ada saja penerima manfaat yang lebih memanfaatkan dana pinjaman untuk membeli perabotan rumah tangga dibandingkan untuk melakukan usaha ataupun hal yang bermanfaat dahulu. Harusnya kelompok-kelompok SPP itu menggunakan dana untuk usaha terlebih dahulu, barulah setiap keuntungan yang didapat dari usahanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Dampak dari peruntukan dana yang tidak sesuai akan terlihat pada tingkat pengembalian yang selalu mundur dan tidak tepat waktu. Seperti yang terlihat dalam laporan kolektibilitas pinjaman periode Desember 2015, sejumlah dana sebesar Rp 1.465.442.000 (Terbilang *satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*) masih tertahan di masyarakat baik itu yang tergolong kolektibilitas satu sampai kolektibilitas lima. Konsekuensi jika terdapat tunggakan adalah namanya akan masuk dalam daftar *blacklist*, atau bahkan desanya tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti kegiatan SPP. Saat ini, ada satu desa yaitu Gumawang, tidak bisa berpartisipasi dalam program ini karena masih ada dana Rp 61.150.000 (Terbilang *enam*

ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tertahan dikelompok. Tahun 2010 menjadi tahun terakhir untuk desa Gumawang melakukan pinjaman. Daftar kolektibilitas pinjaman pada UPK di kecamatan Belitang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Kolektibilitas Pinjaman**

NO	DESA	SISA PINJAMAN YANG ANSURANNYA LANCAR	SISA PINJAMAN YANG ANSURANNYA MENUNGGAK 1 S/D 2 KALI	SISA PINJAMAN YANG ANSURANNYA MENUNGGAK 3 S/D 4 KALI	SISA PINJAMAN YANG ANSURANNYA MENUNGGAK 5 S/D 6 KALI	SISA PINJAMAN YANG ANSURANNYA LEBIH DARI 6 KALI
		KOLEKTIBILITAS I	KOLEKTIBILITAS II	KOLEKTIBILITAS III	KOLEKTIBILITAS IV	KOLEKTIBILITAS V
1	Sidogede	16.800.000	2.400.000	0	0	2.655.000
2	Harjo Winangun	92.000.000	27.815.000	0	0	3.905.000
3	Gumawang	0	0	0	0	61.250.000
4	Triyoso	50.700.000	0	0	0	0
5	Tawang Rejo	72.000.000	0	0	0	0
6	Banjarejo	0	0	0	0	0
7	Margokoyo	0	0	0	0	0
8	Sidomulyo	0	0	0	0	0
9	Tegal Rejo	21.900.000	0	0	0	0
10	Sidomakmur	0	0	0	0	22.670.000
11	Sumbersuko Jaya	105.200.000	0	0	865.000	9.857.000
12	Sumber Suko	46.700.000	61.405.000	0	0	27.850.000
13	Sidorahayu	31.500.000	0	0	0	38.665.000
14	Rejosari	0	0	0	0	0
15	Bedilan	0	0	0	0	13.970.000
16	Sumber Agung	0	0	0	0	0
17	Gedung Rejo	11.300.000	27.480.000	0	0	21.620.000
18	Pujorahayu	23.000.000	7.395.000	0	0	28.270.000
19	Sidodadi	211.700.000	6.140.000	0	0	0
20	Tanjung Raya	109.000.000	0	0	0	0
21	Sukajadi	0	0	0	0	200.000
22	Karang Kemiri	28.800.000	0	10.675.000	0	0
23	Sukosari	80.300.000	0	0	0	0
24	Gunung Mas	11.900.000	16.800.000	0	0	3.355.000
25	Sukarami	0	0	0	0	0
26	Mojosari	157.400.000	0	0	0	0
	TOTAL	1.070.200.000	149.435.000	10.675.000	865.000	234.267.000

**Sumber : Laporan UPK Belitang**

Dari total 26 desa penerima manfaat SPP, ada 12 desa yang sudah macet melakukan pembayaran angsuran lebih dari 6 kali pembayaran. Jika tabel 5 disederhanakan, maka akan terbentuklah tabel 6 seperti dibawah ini :

**Tabel 6. Kolektibilitas Pinjaman**

Tingkat Kolektibilitas	Jumlah Pinjaman
Kolektibilitas I	1.070.200.000
Kolektibilitas II	149.435.000
Kolektibilitas III	10.675.000
Kolektibilitas IV	865.000
Kolektibilitas V	234.267.000
Total	1.465.442.000

**Sumber : Laporan UPK Belitang**

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa jumlah dana yang cukup besar masih tertahan dimasyarakat. Ini menjadi salah satu faktor penghambat program bisa dibilang hampir tidak pernah mengalami surplus anggaran. Kategori kolektibilitas I diperuntukkan untuk setoran bulan berjalan, kolektibilitas II diperuntukkan untuk yang menunggak satu sampai dua bulan, kolektibilitas III diperuntukkan untuk yang menunggak tiga sampai empat bulan, kolektibilitas IV diperuntukkan untuk yang menunggak lima sampai enam bulan, dan kolektibilitas V diperuntukkan untuk yang menunggak lebih dari enam bulan. Kolektibilitas I lebih mencakup kepada kelompok yang angsurannya sedang berjalan. Dana yang macet pembayarannya sampai lebih dari 6 bulan berjumlah Rp 234.267.000 (terbilang *dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah* ) berada dalam 12 desa yaitu desa Sidogede, Harjo Winangun, Gumawang, Sidomakmur, Sumber Suko Jaya, Sumber Suko, Sidorahayu, Bedilan, Gedung Rejo, Pujorahayu, Sukajadi dan Gunung Mas. Kolektibilitas terjadi karena anggota kelompok tidak membayar angsuran tiap bulan yang dikumpulkan kepada ketua yang akan disetorkan langsung ke UPK. Identifikasi kelompok yang termasuk dalam kolektibilitas V dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 7. Identifikasi Kolektibilitas Kelompok**

No.	Nama Kelompok	Desa	Jumlah Tunggakan	Keterangan
1	Bunga Seroja	Gumawang	5.700.000	Tunggakan ada di ibu Rina Sari, SE

2	Manggis	Gumawang	12.190.000	Tunggakan ada di ibu Anisa
3	D.W.Nurhidayah	Gumawang	4.400.000	Tunggakan ada di ibu Zubaidah
4	Nusa Indah	Gumawang	3.885.000	Tunggakan ada di ibu Diana Sulistianingsih
5	Nusa Indah II	Gumawang	7.550.000	Tunggakan ada di ibu Evi Meiliana dan Ibu Idayati
6	D.W.Manggar	Gumawang	7.575.000	Tunggakan ada di ibu Istiqomah dan Ibu Khotimah
7	Cempaka	Gumawang	1.200.000	Tunggakan ada di ibu Eriyani
8	D.W.Nurhidayah II	Gumawang	10.700.000	Tunggakan ada di ibu Waifah
9	Delima	Gumawang	6.725.000	Tunggakan ada di ibu Yulierti
10	Tanjung	Gumawang	4.370.000	Tunggakan ada di ibu Sutiyeem, Ibu Lena dan Ibu Hilaliyah
11	Teratai Indah	Gumawang	7.420.000	Tunggakan ada di ibu Hamidah & Ibu Cicilia
12	Kenanga	Sido Makmur	6.700.000	Tunggakan ada di Ibu Tukinah
13	Mawar Putih	Sido Makmur	15.970.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
14	Mawar	Sidorahayu	6.000.000	Tunggakan ada di ibu Paini
15	Pambayun	Sidorahayu	10.195.000	Tunggakan ada di ibu Titi handayani, ibu Suhartini dan ibu Rubiatun
16	Anggrek	Sidorahayu	910.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
17	Melati	Sidorahayu	7.255.000	Tunggakan ada di ibu Aan Andriyani, ibu suyatmi dan ibu sainah
18	Matahari	Sidorahayu	3.350.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
19	Tunas Mandiri	Sidorahayu	7.615.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
20	Puspa Mandiri	Sidorahayu	3.340.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
21	Mawar	Gedung Rejo	8.900.000	Anggota Kelompok Sudah Menyetor ke ibu Bonita, ybs tidak menyetorkan ke UPK
22	Kediri Jaya	Gedung Rejo	5.830.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
23	Jamu	Gedung Rejo	3.890.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
24	Sejahtera	Gedung Rejo	3.450.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
25	PKK Indah	Sidogede	2.655.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
26	Karya Bunda Mawar II	Bedilan	3.600.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
27	Karya Bunda Anggrek	Bedilan	8.335.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
28	Al-Barokah	Bedilan	1.035.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
29	Karya Bunda III	Bedilan	1.000.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
30	Gamis	Pujo rahayu	5.870.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
31	Anggun	Pujo rahayu	23.060.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
32	Cendana	Sumbersuko Jaya	1.970.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
33	Jamur	Sumbersuko Jaya	7.887.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
34	Lidah Buaya	Sumber Suko	11.475.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
35	Kecubung	Sumber Suko	16.375.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
36	Banjar Negara I	Harjowinangun	3.185.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
37	Mekar Sari	Harjowinangun	720.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
38	Mawar Indah	Sukajadi	200.000	Tunggakan ada di anggota kelompok
39	Pinang	Gunung Mas	3.355.000	Tunggakan ada di anggota kelompok

Sumber : Laporan Identifikasi Koleabilitas Kelompok SPP UPK Belitang

Ada 39 kelompok yang masuk dalam kategori koleabilitas V. Jika kelompok dalam kategori koleabilitas II-V digabungkan, maka jumlah total kelompok yang menunggak ada

53 kelompok. Untuk mendapatkan titik terang dari dana yang menunggak dengan cara tim dari pinjaman bermasalah mendatangi langsung ke desa dimana angsuran itu menunggak. Menemui ketua kelompok dan kemudian menanyakan langsung permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok tersebut. Namun ada juga kelompok SPP di beberapa desa yang tidak pernah telat ataupun menunggak dalam pembayaran angsuran dari pertama mengikuti program sampai sekarang, desa-desa itu adalah desa Triyoso, Tawang Rejo, Banjar Rejo, Margokoyo, Tegal Rejo, Tanjung Raya, Sukajadi, Sukosari, Sukarami, dan Mojosari.

Pengeluaran anggaran dana SPP bisa disebut dengan investasi publik yang dilakukan pemerintah guna melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melaksanakan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih atau dikenal dengan *good governance*. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama *good governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi (1) akuntabilitas, (2) keterbukaan dan transparansi, (3) ketaatan pada hukum, dan (4) partisipasi masyarakat ( Halim dan Kusufi, 2012:108).

Dalam penelitian ini akan melihat prinsip pemerintahan yang baik dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitas (*accountability*) (dalam Kumorotomo, 2013:3) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan masyarakat dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang

sesungguhnya. Akuntabilitas publik yang harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwod, 1993 (dalam Mardiasmo, 2009 : 21 ) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability or brobity and legality*), Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas program (*program accountability*) dan Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Penyebarluasan informasi pengelolaan dana bergulir program SPP merupakan kewajiban bagi pelaksana program, supaya di dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat mengetahui dana SPP benar-benar telah digunakan atau tidak. Dalam hal ini, BKAD berperan sebagai pengelola program dan sebagai organisasi sektor publik dituntut memenuhi dimensi akuntabilitas yang disebutkan oleh Ellwod untuk melaksanakan *good governance*. Akuntabilitas BKAD dilihat dari pengelolaan dana bergulir dan pelaksanaan program harus transparan dan mengikutsertakan masyarakat. Pelaporan yang akuntabel berarti dalam menyampaikan laporan baik vertikal ketingkat kecamatan maupun horizontal ke tingkat masyarakat haruslah transparan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan SPP. Pemberian laporan pertanggungjawaban ke masyarakat luas bertujuan agar masyarakat mengetahui perputaran dana dengan banyaknya dana yang masih tergolong dalam kolekbilitas sehingga sadar dengan penggunaan dana SPP yang diberikan harus digunakan sebagaimana mestinya. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, yang biasa disebut dengan *Good Governance*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Oleh Perempuan(SPP) Di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan mempunyai manfaat yaitu:

#### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang akuntabilitas, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang administrasi negara khususnya pada kajian administrasi keuangan publik.

#### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah khususnya pemerintah Belitang dalam mempertanggungjawabkan dan mengelola dana yang akan di salurkan ke masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Bunga Rampai.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa transisi)*. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar.

Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

M. Suparmoko. 2012. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta. BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta. PNRI.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama. Sinar \ Grafika Offset.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode D&R*. Bandung. ALFABETA.

Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) MANDIRI.*

**Jurnal :**

Sadjiarto, A. 2000. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Akuntabilitas dan Pengukuran*

*Kinerja Pemerintahan.*2(2) :138-150.

(<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>, diakses tanggal 1 Februari 2017)

Sa'adah, B. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-*

*Government (Studi tentang penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar).* 3(2).

**Dokumen**

UPK Kecamatan Belitang. 2015. *Laporan Bulanan.* OKU Timur.

Penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir

**Skripsi:**

Deliana, Pratiwi. 2013. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan dalam Pengadaan*

*Halte Khusus Trans Musi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.*

Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Desriyani, Riska. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di*

*Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin Tahun 2010*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Purnando, Hengki. 2013. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Studi di Desa Lubuk Sakti dan Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya tahun 2011*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Rahmawati, Ari. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

**Internet:**

Kusrini Maruti, Sri. 2013. *Responsivitas Pelayanan kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi Program Larasita*. Dipublikasikan. 2013. Surakarta: program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret

(online),(<https://tentangmaruti.files.wordpress.com/2013/11/mitra-benar.pdf>).

Diakses 6 Januari 2017 pukul 14:53

PNPM Mandiri. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Perdesaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan). Diakses tanggal 16 September 2015